

POTENSI DAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN KELURAHAN TAMANGAPA KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR

Nurfatihmah

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Email : nurfatihmah@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini tentang potensi dan permasalahan yang terdapat di Kelurahan Tamangapa Kota Makassar, dengan melihat kondisi eksisting dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini data didapatkan dengan survey lapangan dan studi Pustaka. Dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, analisis shift share dan analisis LQ. Setelah melakukan analisis maka dihasilkan bahwa Ketersediaan daya tampung lahan untuk perumahan di Kelurahan Tamangapa untuk 20 tahun kedepan umumnya masih dapat memadai. Proyeksi dalam kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu 20 tahun kedepan di Kelurahan Tamangapa cukup banyak yang harus dibangun, sehingga perencanaan pada tingkat tapak diharapkan perhitungan yang matang. TPA Antang dalam menampung sampah Kota Makassar telah melebihi kapasitasnya dengan luasan TPA yang relative kecil.

Kata Kunci: *Potensi, Permasalahan, Lingkungan*

A. PENDAHULUAN

Kota merupakan suatu lingkungan binaan yang selalu berubah dan berkembang sebagai wadah lingkungan fisik yang menampung segala kegiatan fungsional dan sosial masyarakat, maka sebuah perkotaan harus mengandung unsur – unsur masyarakatnya. Secara ideal bisa dikatakan bahwa suatu perkotaan adalah lingkungan binaan manusia akan ruang tempat hidup, mencari penghidupan, dan berbudaya. Sehingga kebutuhan lahan sebagai ruang dalam proses pembangunan terus bertambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terus berkembang baik dari segi penduduk maupun infrastruktur pendukungnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 1.508.212 jiwa, selanjutnya tahun 2019 meningkat sebanyak 1.526.677 dan di tahun 2020 menurun menjadi 1.423.877 jiwa, penurunan jumlah penduduk dikarenakan dampak dari pandemic Covid – 19 yang sedang terjadi di seluruh negara.

Fenomena pesatnya penurunan jumlah penduduk di Kota Makassar saat pandemic Covid – 19 besar kemungkinan dari aksesibilitas masyarakat yang kurangnya menerapkan protocol Kesehatan dan untuk kota yang cukup memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Selain itu Kota Makassar merupakan salah satu pintu gerbang para wisatawan yang hendak ingin berwisata di wilayah di Pulau Sulawesi. Di samping itu, Kota Makassar merupakan Kawasan pesisir pantai, dimana Makassar memiliki Pelabuhan cukup besar yang menjadi jalur perdagangan baik dari pulau Jawa, Kalimantan, Maluku dan lain – lain. Hal ini yang membuat Kota Makassar berkembang cukup pesat dalam segi perekonomian, sehingga

Nurfatihmah; Potensi dan Permasalahan Lingkungan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

masyarakat akan melirik Kawasan pesisir sebagai tempat hunian baru dan berharap pemerintah akan menyediakan sarana prasarana permukiman di kemudian hari. Tekanan akan kebutuhan ruang tempat tinggal yang dekat dengan pusat perdagangan dan jasa membuat hamapir sepanjang pesisir timbul hunian – hunian baru.

Pembangunan yang cukup masif, kepadatan penduduk yang cukup besar, serta kurangnya kontrol pemerintah dalam penataan mengakibatkan munculnya Kawasan kumuh dan juga limbah dan persampahan yang menumpuk di beberapa wilayah Kota Makassar. Kelurahan Tamangapa merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Manggala yang dibangun sebuah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampung sampah/limbah rumah tangga dengan cakupan Kota Makassar, sedangkan kepadatan penduduk di Kota Makassar sendiri menurut data BPS Sulawesi Selatan mencapai 8.471 Jiwa/Km². Berdasarkan kepadatan penduduk ini, kebutuhan akan ruang untuk pengelolaan sampah/limbah serta sarana prasarana penduduk di Kawasan ini. Pada Kota Makassar, Kelurahan Tamangapa dalam rencana tata ruang wilayah diarahkan sebagai Kawasan pengembangan system pengelolaan sampah sebagai Kawasan pendukung untuk sarana prasarana Kota Makassar. Hal ini menjadi masalah, dimana Kawasan yang saat ini khususnya TPA Antang telah melampaui daya tampung dan sering terjadi bencana pada TPA tersebut, dan juga pada sisi timur TPA Antang terdapat rawa dimana dengan adanya TPA tersebut, dan juga pada sisi timur TPA Antang terdapat rawa dimana dengan adanya TPA ini dapat merusak ekosistem lingkungan pada wilayah Kelurahan Tamangapa. Berdasarkan hal tersebut, kelurahan Tamangapa teridentifikasi memiliki potensi dan masalah terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan studi terkait dampak lingkungan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Studi lokasi penelitian berada di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar dimana pemilihan lokasi ini berdasarkan potensi dan permasalahan terhadap lingkungan di Kecamatan Manggala.

Data diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari beberapa instansi terkait seperti Badan Perencanaan Daerah, Badan Pertahanan Nasional, Dinas Tata Ruang dan Badan Pusat Statistik Kota Makassar serta Kantor Kecamatan Manggala dan Kantor Kelurahan Tamangapa dengan jenis data kualitatif yang menjelaskan secara deskripsi tentang keadaan lokasi penelitian seperti letak dan Batasan, perkembangan, kondisi penggunaan lahan, penyebaran fasilitas dan kondisi jalan, sedangkan data kuantitatif dalam bentuk angka – angka seperti jumlah penduduk sarana dan prasarana Kelurahan Tamangapa dan lainnya.

Sumber data menurut Teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui survey atau observasi lapangan yaitu suatu teknik penyaringan data melalui pengamatan langsung kepada objek penelitian untuk memahami kondisi kualitatif objek studi. Data ini terdiri atas kondisi fisik wilayah, sarana dan prasarana, penyebaran fasilitas kondisi fisik lahan, kondisi jalan dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh melalui telaah Pustaka atau observasi berupa dokumen – dokumen yaitu salah satu teknik penyaringan data melalui instansi geografis

Nurfatimah; Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

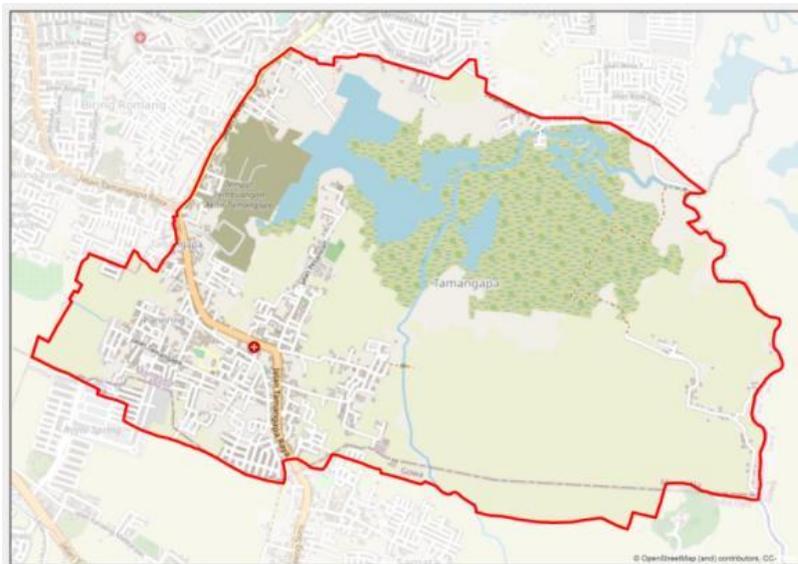
wilayah/administrasi, topografi, klimatologi, hidrologi, geologi, pola pemanfaatan lahan dan jumlah penduduk.

Analisis yang digunakan untuk mengetahui potensi pengembangan lahan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala yaitu menggunakan analisis deskriptif, analisis shift share, analisis LQ, dan analisis lainnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Wilayah Penelitian Kelurahan Tamangapa

Kelurahan Tamangapa adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Manggala Kota Makassar yang berasal dari pemekaran Kelurahan Bangkala. Secara administrasi Kelurahan Tamangapa termasuk dalam wilayah Kecamatan Manggala terdiri dari 7 RW dan 43 RT dengan luas wilayah 31,56% dari luas wilayah Kecamatan Manggala atau seluas 7,62 km terbagia menjadi 7 RW dan 43 RT. Adapun batas – batas administrasi wilayah penelitian yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Manggala, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bangkala.



Gambar 1.Peta Administrasi Kelurahan Tamangapa

Luas wilayah yang dimilikinya dapat diperincikan berbagai jenis – jenis pola penggunaan lahan yang ada sebagaimana letak geografisnya yang berada pada dataran rendah dan merupakan Kawasan perkotaan. Didapatkan berbagai jenis penggunaan lahan yang merupakan area permukiman, persawahan, dan kebun campuran, selebihnya itu merupakan pola penggunaan lahan untuk pekarangan dan prasarana umum seperti pemakaman, permukiman, serta TPA. Penggunaan lahan yang ada saat ini cukup mengalami peningkatan yang signifikan disbanding beberapa tahun lalu. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penduduk yang setiap tahunnya terus meningkat.

Nurfatihmah; Potensi dan Permasalahan Lingkungan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Kondisi jaringan utilitas lokasi penelitian yaitu terdapat saluran drainase, jaringan air bersih, jaringan listrik, system pembungan sampah dan jaringan telpon pada wilayah Kelurahan Tamangapa. Jaringan drainase yang terdapat di Kelurahan Tamangapa terdiri dari drainase sekunder dan tersier dengan kondisi permanen dan temporer (tanah). Berdasarkan RTRW lokasi penelitian ini diperuntukan sebagai Kawasan resapan air, Kawasan/wilayah yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Berdasarkan yang ada di lokasi Kelurahan Tamangapa terdapat drainase suplai air ke dalam tanah. Namun tidak semua ruas jalan yang terdapat jaringan drainase.

Sumber air minum yang digunakan masyarakat kelurahan Tamangapa bersumber air minum yang digunakan masyarakat Kelurahan Tamangapa bersumber dari PDAM (IPA III Antang dan air tanah dalam (Artesis). Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi. Kondisi pengolahan air buangan di Kelurahan Tamangapa untuk jangka pendek tidak membahayakan lingkungan oleh karena produksi air buangan umumnya berasal dari aktivitas rumah tangga, namun untuk jangka Panjang diperlukan suatu pewadahan guna mengalirkan dan membuang air buangan tersebut. Di Kelurahan Tamangapa hampir semua rumah memiliki MCK sendiri atau jamban internal/keluarga, dan di lokasi penelitian ini terdapat MCK umum yang dapat digunakan oleh warga setempat.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara di Kelurahan Tamangapa warga hanya membuang sampah langsung ke TPA namun ada juga yang dikelola oleh petugas kebersihan dan sebagai warga juga membakar sampah pada halaman rumah tanpa diangkut dengan mobil sampah atau mobil kontener yang harus dibawa ke TPA, maka teknis pengelolaan persampahan yang ada di Kelurahan Tamangapa berada dalam tahap baik.



Gambar 3. TPA Antang Kelurahan Tamangapa

Nurfatimah; Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Keadaan fasilitas pelayanan seperti fasilitas perumahan, fasilitas pemerintahan, fasilitas peribadatan, fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan dan fasilitas olahraga. Fasilitas perumahan yakni terdapat beberapa pusat aktivitas dan perumahan seperti tempat ibadah dan sekolah, dan perkantoran yang berlokasi di sekitar 1 km dari lokasi TPA. Perumahan tersebut antara lain Perumahan Antang, Perumahan TNI Angkatan Laut, Perumahan Graha Janah, Perumahan Griya Tamangapa, dan Perumahan Taman Asri Indah yang berlokasi berdekatan dengan TPA Tamangapa. Terdapat dua buah rawa yang berdekatan dengan perumahan tersebut, yaitu Rawa Borong yang berlokasi sebelah utara dan Rawa Mangara yang bertempat disebelah timur. Air dan rawa mangara mengalir menuju Sungai Tallo dan air rawa borong mengalir menuju saluran air borong.

Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Tamangapa yakni Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu 2 buah, Poskesdes 2 buah, Puskesmas Kelilinh, Posyandu Balita 15 buah, Posyandu Lansia 6 buah serta Praktek Dokter Swasta 2 buah.

Berdasarkan observasi lapangan terdapat sarana peribadatan sejumlah 22 yang terdiri dari masjid dan mushollah. Diketahui bahwa kepercayaan warga pada Kelurahan Tamangan adalah 90% menganut agama Islam.

Fasilitas olahraga di Kecamatan Manggala terdapat 4 Lapangan Sepak Bola, 4 Lapangan Bola Volley, 6 Lapangan Bulutangkis. Ke 4 lapangan sepak Bola tersebut terletak di Kelurahan Borong, Mangga dan Kelurahan Antang. Keberadaan lapangan sepak bola tersebut sangat membantu para pemuda di Kecamatan Manggala dalam mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang olahraga Sepak Bola.

2. Analisis Tata Guna Lahan

Dilihat dari aspek tata guna lahan sekitar, lokasi Kelurahan Tamangapa terletak pada sisi terluar Kota Makassar dan Bersebelahan dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa, di mana kawasan permukiman berada pada sisi Barat dan Selatan. Sesuai dengan RTRW Kota Makassar pada Peta Tata Guna Lahan di Kelurahan Tamangapa sebagian besar didominasi oleh Persawahan pada bagian utara, tengah dan timur, akan tetapi kondisi fisik di lapangan terdapat areal perairan berupa rawa di bagian tengah. Pada areal rawa tersebut berdekatan dengan TPA Antang, sesuai dengan kondisi terkini saat survei lapangan, lokasi TPA Antang yang berdekatan pada rawa tersebut dapat mencemari ekosistem perairan dan tanah, sebab kondisi TPA Antang diperuntukkan untuk menampung hampir seluruh persampahan di Kota Makassar, akan tetapi kapasitas yang ada kurang memenuhi hingga akhirnya kondisi sampah saat ini telah menumpuk banyak, terlebih area perairan pada Kelurahan Tamangapa tepat berada di tengah pemukiman dan sawah.

Disisi lain terkait Rencana Pola Ruang atau wilayah yang direncanakan sesuai dengan RTRW Kota Makassar terdapat tidak kesesuaian lahan pada saat survei lokasi studi dan juga overlay pada peta, Dari hasil overlay pada peta tematik tata guna lahan dengan peta areal terbangun di dapatkan data sebagai berikut:

Nurfatihmah; Potensi dan Permasalahan Lingkungan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Tabel 1 Hasil digitasi data tematik tata guna lahan

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas awal (Ha)	Luas Lokasi Tidak Sesuai (Ha)	Keterangan Perubahan	Hasil Overlay (Ha) (Luas awal - Lokasi yg tidak sesuai)	Hasil Akhir (Ha)
1	Kebun Campuran	35,75	11.63	Terdapat Permukiman	24.14	24.14
2	Lahan Kosong	6,74	6.74	- Terdapat Lokasi TPA - Terdapat Pemukiman	0	0
3	Permukiman	92.24	-	-	92.24	146.16
4	Sawah	410.87	50.85	- Terdapat pemukiman - Terdapat lokasi TPA - Adanya area perairan seperti rawa	360.02	360.02
5	Sawah Irigasi	93.27	37.24	Berubah Menjadi Pemukiman	56.03	56.03
6	Semak Belukar	84.15	-	-	84.15	84.15
7	TPA	13,66	-	-	13.66	24.09
8	Bakau	1,75	1.75	Area persawahan	0	0
9	Makam	0,05	-	-	0.05	0.05
TOTAL		740.30	108.21			740.30

Untuk memenuhi kebutuhan sarana lingkungan masyarakat Kelurahan Tamangapa kedepan kami menggunakan data RBI peta sesuai dengan RTRW Kota Makassar, maka didapatkan data sebagai berikut:

Tabel 2 proyeksi kebutuhan lahan dalam proyeksi kepadatan penduduk 20 tahun ke depan

Tahun	Jumlah Proyeksi Penduduk (jiwa)	Jumlah Kepadatan Penduduk		Keterangan kepadatan penduduk	Luas kebutuhan lahan terbangun
		Jiwa/km ²	Jiwa/ha		
2021	15.329	2.012	51	Rendah	170.30

Nurfatimah; Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

2026	19.161	2.515	56	Rendah	212.87
2031	23.951	3.143	62	Rendah	266.09
2036	29.939	3.929	70	Rendah	332.61
2041	37.524	4.924	81	Rendah	416.88

Sesuai dengan Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan SNI 03-1733-2004, untuk kepadatan penduduk Kelurahan Tamangapa termasuk dalam kepadatan yang rendah yang disebabkan Kelurahan Tamangapa termasuk dalam wilayah pinggiran kota. Selanjutnya kebutuhan lahan untuk area terbangun hingga 20 tahun ke depan masih cukup.

Peran dan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dalam Instruksi Mendagri no. 4 tahun 1988, yang menyatakan "Ruang terbuka hijau yang populasinya didominasi oleh penghijauan baik secara alamiah atau budidaya tanaman, dalam pemanfaatan dan fungsinya adalah sebagai areal berlangsungnya fungsi ekologis dan penyangga kehidupan wilayah perkotaan Sesuai dengan SNI 03-1733-2004 bahwa Kebutuhan luas lahan ruang terbuka hijau berdasarkan kapasitas pelayanan sesuai jumlah penduduk, dengan standar 1 m² /penduduk. Dari hasil analisis kebutuhan ruang terbuka hijau maka di dapatkan data sebagai berikut:

Tabel 3 kebutuhan RTH pada Kelurahan Tamangapa

Tahun	Jumlah Proyeksi Penduduk (jiwa)	Luas kebutuhan RTH (Ha)
2021	15.329	1.5
2026	19.161	1.9
2031	23.951	2.4
2036	29.939	3.0
2041	37.524	3.8

Dari tabel proyeksi kebutuhan RTH untuk 20 tahun ke depan bahwa luas Kelurahan Tamangapa dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat Kelurahan Tamangapa, dan hal ini dapat di lihat dari peta sebagaimana RTH saat ini telah tersedia lebih dari 1.5 Ha.

3. Analisis Prasarana

Berdasarkan data observasi dan kuesioner didapatkan bahwa penggunaan air minum untuk kebutuhan warga di Kelurahan Tamangapa menggunakan sumber air dari sumur galian dan sumur bor. Sumber air minum yang digunakan masyarakat Kecamatan Manggala bersumber dari PDAM (IPA III Antang) dan air tanah dalam (artesis).

Nurfatimah; Potensi dan Permasalahan Lingkungan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Jaringan jalan di semua Kelurahan Tamangapa di Kecamatan Manggala sudah tersedia dan dalam kondisi baik, di mana jalan sudah teraspal, namun masih terdapat lubang-lubang maupun kerusakan yang mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dari hasil identifikasi, infrastruktur jalan untuk menunjang operasional penduduk di Kelurahan Tamangapa dalam kondisi baik itu jalan kelurahan maupun jalan lingkungan. Dalam analisa akses jalan ini, hampir semua area kelurahan sudah tersedia jalan dalam kondisi baik dengan persentase 92%, sedangkan untuk kesediaan jalan kondisi belum tersedia dengan nilai 8%, hal ini karena jalan masih tanah.

Jika melihat kebutuhan sesuai SNI, maka kondisi lebar jalan di Kelurahan Tamangapa sudah memenuhi standar. Dari hasil analisis di atas menyatakan bahwa kondisi jalan di kelurahan Tamangapa rata - rata semuanya sudah mencapai target yakni kondisi baik. Meskipun ada jalan yang rusak tetapi hanya di beberapa ruas jalan begitu pun jalan yang berlubang ataupun yang kondisi jalan yang tidak baik, hanya terdapat di sebagian kecil jalan yang ada di jalan kelurahan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, beberapa ruas jalan lingkungan, terutama pada zona permukiman radius ≤ 500 m dari TPA Tamangapa Raya juga digunakan untuk penimbunan/penjemuran sampah hasil pemilahan. Hasil pemilahan sampah yang ditimbun ataupun dijemur pada badan jalan tersebut berakibat pada sempitnya lebar permukaan jalan eksisting, sehingga aksesibilitas permukiman menjadi berkurang. Dampaknya warga lebih banyak menggunakan motor sebagai alat transportasi dibanding mobil ataupun sepeda.

Konsumsi energi mengalami kenaikan rata-rata 7% per tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk. Peningkatan kebutuhan energi tersebut harus didukung adanya pasokan energi jangka panjang secara berkesinambungan, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Dalam mengantisipasi krisis energi yang diperkirakan akan terjadi kurang waktu 20 tahun akan datang, pemerintah, lembaga penelitian maupun masyarakat dalam mengantisipasi kelangkaan energi melakukan berbagai cara guna melakukan penghematan energi dan mendukung pengembangan energi alternatif dari sumber terbarukan.

Jaringan drainase di wilayah studi dalam kondisi baik rata - rata bentuk drainase di wilayah studi yaitu berbentuk persegi dan trapesium, saluran bentuk persegi ini biasa terbuat dari pasangan batu atau beton, menampung dan menyalurkan limpasan air hujan dengan debit yang besar menjadi fungsi utama dari saluran air bentuk persegi ini. Saluran air kotor pada kelurahan Tamangapa masih terlihat belum merata nampaknya pada jalan utama masuk ke lokasi sudah ada saluran riol kota akan tetapi di dalam lingkungan permukiman belum ada, hal ini yang sering menyebabkan daerah ini banjir. Pembuatan saluran riol kota yang terdapat di jalan utama juga masih belum memadai dan belum sesuai dengan standar perencanaan bila dilihat dari volume penampung dan tipe jalan yang ada.

Sampah telah menjadi masalah yang besar, bagi kota-kota besar di Kota Makassar. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan yang masih rendah khususnya di perkotaan dapat berdampak pada meningkatnya wabah penyakit menular seperti tipus, kolera, muntaber, disentri, pes, leptospirus, salmonelosis, demam gigitan tikus. Selain itu, sampah yang dibuang ke kanal dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir (Percik, Vol. 5 Tahun I/Agustus 2004). Volume sampah di Makassar tahun 2004 tercatat 4.330 ton per hari, jumlah ini meningkat cukup signifikan dibanding tahun 2003 sebesar 3.748 ton, dengan komposisi sampah organik 87,21%, kertas 4,42%, plastik 5,84% dan selebihnya aluminium, kaca, kayu dan jenis lainnya. Kapasitas limbah padat Makassar untuk saat ini mencapai 1.860 m³/hari yang dibuang ke TPA Tamangapa. Timbulan sampah pasar mencapai 60,10 % atau 16,69 % dari total timbulan sampah kota Makassar (STLHD, 2006). Sebagian besar sampah tersebut adalah sampah organik yang berasal dari pedagang sayur-mayur dan buah-buahan serta sisa-sisa makanan, serta dari para pembeli dan pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Hal ini diakibatkan bukan saja karena pertambahan jumlah penduduk tetapi juga karena meningkatnya timbulan sampah per kapita yang disebabkan oleh perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan.

Peningkatan jumlah sampah di Kota Makassar dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, berdasarkan data kinerja penanganan sampah persentase jumlah sampah yang tidak terlayani masih lebih besar dibanding persentase sampah yang terlayani. Berdasarkan uraian di atas, DLH Kota Makassar menyadari bahwa Perwali Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik belum mampu menjawab permasalahan sampah plastik secara menyeluruh di Kota Makassar. Terbukti pada tahun 2020 sampah plastik di Kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 294 ton/hari dibanding pada tahun 2019 yang hanya 258 ton/hari. Perwali ini hanya mengatur regulasi tentang penggunaan kantong plastik, meskipun ada banyak jenis sampah plastik lainnya yang memenuhi TPA dan daerah perairan di Kota Makassar, seperti wadah makanan dan minuman, sedotan plastik, styrofoam, dan masih banyak lagi. Komposisi sampah plastik di Kota Makassar sangat bervariasi, sehingga aturan yang mencakup pengendalian keseluruhan jenis plastik merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Keberhasilan penerapan aturan juga sangat tergantung terhadap kolaborasi semua unsur, mulai dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jumlah sampah plastik yang tidak terkelola diperkirakan ± 100 ton/hari. Sebagai perbandingan, pada tahun 2020 sampah plastik di Kota Makassar diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 294 ton/hari dibanding pada tahun 2019 yang hanya 258 ton/hari. Data tahun 2016 diperoleh persentase jumlah sampah yang terlayani di Kota Makassar sebesar 28,54% (436,30 m³/hr), sedangkan persentase jumlah sampah yang tidak terlayani sebesar 71,46% (1.092,17 m³/hr). Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah untuk menyediakan prasarana untuk pengelolaan persampahan dengan menyiapkan teknologi yang ramah lingkungan disertai dengan SDM yang handal untuk melaksanakan pengelolaan persampahan.

4. Analisis Sarana

Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan suatu perilaku seseorang yang sehat maupun sakit agar tetap sehat untuk memperoleh penyembuhan bagi pemecahan masalah kesehatannya. Masalah kesehatan sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah lain di luar kesehatan. Sarana kesehatan yang ada di wilayah kerja Kelurahan Tamangapa adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan 20 Tahun Ke depan di Kelurahan Tamangapa

No	Jenis Fasilitas Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung	Proyeksi jumlah penduduk 20 tahun kedepan	Standar Ketersediaan Fasilitas	Eksisting Fasilitas	Kebutuhan Fasilitas 20 tahun kedepan
1	Rumah sakit	120,000	37,525	0	1	-
2	Puskesmas	30,000	37,525	1	1	-
3	Puskesmas Pembantu	30,000	37,525	1	1	-
4	Tempat praktek bidan	10,000	18,745	2	1	1
5	Posyandu Family	1,000	18,748	19	8	11
6	Apotek	10,000	37,525	4	2	2
7	Dokter Praktek	5,000	37,525	8	2	6

Permukiman Kota Makassar ini sebagian ke pesisir Teluk Kota Makassar, dimana berkembang kelompok permukiman nelayan yang kondisinya cukup memprihatinkan utamanya dari aspek prasarana dan sarana dasar lingkungan permukiman. Alokasi realisasi program peningkatan kualitas lingkungan permukiman pada Kawasan Perkotaan Kota Makassar ini belum mampu mengatasi secara signifikan permasalahan di seputar permukiman perkotaan, terutama kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Kondisi prasarana dan sarana permukiman secara kuantitas menyebar ke wilayah kelurahan Tamangapa dengan kemiringan 0 -2% atau memiliki kelas lereng yang datar. Pada tahun 2021 Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tamangapa sebesar 15.329 jiwa dengan kepadatan berkisar 51 jiwa/Ha. Sedangkan pada tahun 2041 jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Tamangapa diproyeksikan sebesar 31.524 jiwa dengan kepadatan penduduk berkisar 81 jiwa/Ha, dengan jumlah keluarga di Kelurahan Tamangapa berjumlah 2.720 KK. Untuk mengetahui terpenuhi atau tidak penggunaan lahan untuk permukiman menggunakan kriteria 1 KK = 60m² maka didapatkan hasil 163.200 m² atau 16 ha. Maka untuk penggunaan lahan untuk permukiman di kelurahan Tamangapa sudah terpenuhi dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Adapun untuk kondisi fisik untuk penggunaan lahan perumahan di Kelurahan Tamangapa yaitu tanpa rekayasa karena terletak pada lahan bermorfologi datar landau dengan kemiringan 0 – 8%.

Pada kelurahan Tamangapa tingkat pendidikan penduduknya sudah sangat memadai, hal ini di lihat pada saat turun di lapangan, sekekolah-sekolah yang ada pada kelurahan Tamangapa seimbang dengan jumlah penduduk yang masih memerlukan pendidikan dibangku. Tingkat pendidikan penduduk di wilayah ini bervariasi mulai dari Perguruan Tinggi, SLTA, SLTP, tamat SD, tidak tamat SD, hingga tidak sekolah. Pengadaan sarana pendidikan sangat bergantung pada kelompok usia sekolah di mana bila dilihat sarana pendidikan pada lingkungan permukiman ini cukup memadai, akan tetapi bila melihat dari standar usia sekolah maka seharusnya sarana pendidikan dasar sudah ada, hal ini menurut standar perencanaan lingkungan permukiman.

Di setiap kelurahan yang ada di kecamatan manggala dapat dijumpai tempat-tempat Ibadah, dan gereja hanya terdapat di kelurahan Antang dan Batua. Menurut data pada tahun 2021, di Kecamatan Manggala terdapat 111 Masjid, 3 gereja, 4 lainnya. Tempat Ibadah yang paling banyak dijumpai adalah di kelurahan Antang dan Bangkala. Kelurahan Antang dan Bangkala memiliki masing-masing 23 tempat Ibadah. Hal ini sangat menunjang penduduk yang bermukim di wilayah kelurahan ini, jadi dalam hal tidak diperlukan lagi penambahan pada lokasi tersebut.

Lapangan usaha umumnya masyarakat Kelurahan Manggala berorientasi pada sub sektor perdagangan yakni; industri rumah tangga, industri meubel serta industri makanan dan minuman dan berbagai kegiatan lainnya. Lapangan kerja masyarakat di Kelurahan Manggala dominan berorientasi pada sub sektor perdagangan. Fasilitas perdagangan yang dimaksud antara lain; pasar umum dan kios/warung makan. Kondisi ekonomi masyarakat merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan dan juga menjadi faktor penentu dalam menentukan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dalam suatu wilayah/daerah.

5. Analisis Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi regional berhubungan erat dengan sektor-sektor yang membentuknya. Artinya, sektor mana saja yang memberikan kontribusi lebih terhadap perekonomian, dan sektor mana saja yang kontribusinya masih kurang sehingga memerlukan perhatian lebih.

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu wilayah. Nilai PDRB dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Sumber data yang penulis digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Produk domestik regional bruto Kota Makassar menurut lapangan usaha 2016-2020 dan Produk domestik regional bruto Provinsi Sulawesi Selatan menurut lapangan usaha 2016-2020.

Nurfatihmah; Potensi dan Permasalahan Lingkungan Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar

Tabel 5 Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha	Tahun					Rata- Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	497,17	505,59	504,69	256	508,93	454,48
B. Pertambangan dan Penggalian	0,84	0,77	0,66	0,58	0	0,57
C. Industri pengolahan	19.558,17	20.806,6	20.856,86	22.728,08	21.767,9	21.143,52
D. Pengadaan Listrik dan Gas	42,29	45	49,36	53,87	51,52	48,41
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	201,33	215,19	228,61	224,81	236,02	221,19
F. Konstruksi	15.585,75	16.897,85	18.397,67	20.034,23	20.232,8	18.229,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran/ Repatasi Mobil dan Sepeda Motor	18.271,24	20.112,43	22.484,33	25.142,39	23.777,63	2.1957,60
H. Transportasi dan Pergudangan	2.312,6	2.516,61	2.737,52	2.995,64	2.476,09	2.607,69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	2.184,96	2.375,28	2.682,32	2.849,88	2.284,79	2.475,45
J. Informasi dan komunikasi	11.081,12	12.168,29	13.735,37	14,916,42	16.487,16	13.677,67
K. Jasa keuangan	5.520,29	5.841,81	6.152,6	6.366,61	6.482,79	6.072,82
L. Real Estat	3.418,46	3.497,12	3.648,89	3.835,37	3.838,84	3.647,74
M, N Jasa Perusahaan	1.009,67	1.094,12	1.205,39	1.354,93	1.200,58	1.172,94
O. administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.840,63	3.004	3.500,85	3.770,96	3.754,75	3.374,24
P. Jasa pendidikan	8.596,48	9.442,55	1.0434,5	11.120,17	11.302,84	10.179,31
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.464,25	2.707,72	3.001,17	3.285,55	3.680,34	3.027,81
S,T,U Jasa Lainnya	2.371,84	2.595,25	2.947,8	3.260,35	2.822,79	2.799,61
TOTAL	95.957,09	103.826,18	112.568,59	122.195,84	120.905,77	111.090,69

Location Quotient adalah suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis dan non basis ekonomi suatu daerah, artinya analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi. Metode ini digunakan untuk melihat sektor-sektor yang termasuk ke dalam kategori sektor unggulan. Analisis ini juga merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah atasnya.

Identifikasi sektor usaha utama di Kota Makassar digunakan analisis Location Quotient (LQ), yaitu dengan membandingkan antara besarnya peranan suatu sektor di daerah analisis terhadap peranan sektor tersebut secara nasional.

Nurfatimah; Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Rumus yang digunakan yaitu:

$$LQ = \frac{V_1^R / V^R}{V_1 / V}$$

Keterangan:

V_1^R = Jumlah PDRB suatu sektor kabupaten

V^R = Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten

V_1 = Jumlah PDRB suatu sektor tingkat provinsi

V = Jumlah PDRB seluruh sektor tingkat provinsi

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan sebagai berikut:

- Jika $LQ > 1$, merupakan sektor basis, artinya tingkat spesialisasi kabupaten lebih tinggi dari tingkat provinsi
- Jika $LQ = 1$, berarti tingkat spesialisasi kabupaten sama dengan di tingkat provinsi
- Jika $LQ < 1$, merupakan sektor non basis, yaitu sektor yang tingkat spesialisasi kabupaten lebih rendah dari tingkat provinsi

Tabel 6 Hasil Perhitungan Indeks Location Quotient (LQ) kota Makassar tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	LQ					Rata-Rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
B. Pertambangan dan Penggalian	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	-	0.0001
C. Industri pengolahan	1.43	1.43	1.40	1.37	1.38	1.40
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.45	0.46	0.46	0.47	0.44	0.46
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.77	1.74	1.73	1.64	1.63	1.70
F. Konstruksi	1.36	1.35	1.33	1.31	1.31	1.33
G. Perdagangan Besar dan Eceran/ Repatasi Mobil dan Sepeda Motor	1.34	1.32	1.31	1.32	1.30	1.32
H. Transportasi dan Pergudangan	0.66	0.66	0.64	0.68	0.71	0.67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	1.68	1.61	1.60	1.57	1.43	1.58
J. Informasi dan komunikasi	1.83	1.80	1.79	1.73	1.73	1.78
K. Jasa keuangan	1.57	1.58	1.57	1.54	1.54	1.56
L. Real Estat	0.98	0.95	0.94	0.92	0.89	0.94
M,n Jasa Perusahaan	2.48	2.46	2.43	2.43	2.40	2.44
O. administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.70	0.70	0.73	0.71	0.71	0.71
P. Jasa pendidikan	1.69	1.67	1.66	1.63	1.58	1.65
Q. Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.32	1.32	1.33	1.32	1.35	1.33
S,T,U Jasa Lainnya	1.89	1.87	1.85	1.84	1.82	1.85

Nilai LQ menunjukkan bahwa sektor pertanian, pertambangan, pengadaan listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, real estat dan aministrasi

pemerintah pertahanan dan jaminan social wajib merupakan sektor non basis. Artinya sektor tersebut berperan sangat kecil dalam perekonomian daerah. Selain itu, sektor-sektor tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya sehingga perlu mendapat pasokan dari luar daerah. Apalagi sektor yang menunjukkan angka LQ tidak lebih dari 0,1, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian yang hanya menunjukkan angka LQ 0,02 dan 0,0001, hal ini menunjukkan bahwa peran sektor tersebut sangatlah kecil bagi perekonomian dan dirasa sektor tersebut tidak dapat untuk diprioritaskan. Akan tetapi sektor yang nilai LQ nya mendekati angka 1, dirasa sektor tersebut masih dapat dikembangkan dan diperhatikan lebih dalam agar hasil produk dari sektor tersebut dapat lebih baik lagi dan sektor tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya serta dapat melayani pasar di luar daerah. Sektor tersebut ialah sektor Transportasi dan Pergudangan; Real Estat; dan administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Terdapat 11 sektor yang merupakan sektor basis. 11 sektor ini terdiri dari Industri pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran/ Repatasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman; Informasi dan komunikasi; Jasa keuangan; Jasa pendidikan; Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Walaupun menunjukkan yang fluktuatif, artinya sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang memiliki peranan besar bagi perekonomian kota Makassar memiliki peran yang lebih menonjol dari pada peranan sektor-sektor tersebut di provinsi. Selain itu, sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang perlu dilihat untuk lebih dikembangkan agar bisa dipertahankan dalam setiap tahun kedepan agar tetap bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta tetap mampu melayani pasar di luar daerah, karena sektor-sektor tersebut setiap tahun dalam kurun waktu analisis selalu menunjukkan angka $LQ > 1$.

Hasil analisis ini dapat dikatakan Kota Makassar daerah yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya ditandai dengan hasil perhitungan LQ yang menunjukkan angka $LQ > 1$ sebanyak 11 sektor dari 17 sektor, ini berarti 65 persen dari semua sektor sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat daerahnya dan tidak bergantung pada impor dari daerah lain. Sektor ini juga pantas untuk diprioritaskan dimasa yang akan datang. Sedangkan 29 persen dari keseluruhan sektor merupakan sektor yang perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah daerah agar bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri tanpa harus mendapat pasokan dari luar daerah serta agar mampu dikatakan sebagai sektor yang mempunyai keunggulan komparatif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dijelaskan pada bagian – bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketersediaan daya tampung lahan untuk perumahan di Kelurahan Tamangapa untuk 20 tahun kedepan umumnya masih dapat memadai

namun kebijakan pada Rencana Pola Ruang di RTRW Kota Makassar perlu disesuaikan kembali apabila Kelurahan Tamangapa dijadikan kelurahan untuk sebaran pemukiman baru.

2. Proyeksi dalam kebutuhan sarana dan prasarana dalam kurun waktu 20 tahun kedepan di Kelurahan Tamangapa cukup banyak yang harus dibangun, sehingga perencanaan pada tingkat tapak diharapkan perhitungan yang matang.
3. TPA Antang dalam menampung sampah Kota Makassar telah melebihi kapasitasnya dengan luasan TPA yang relative kecil.

Berdasarkan kondisi dan potensi untuk pembangunan di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala Kota Makassar maka penulis menyarankan:

1. Perlunya mempercepat dalam penetapan kebijakan untuk rencana pembangunan daerah agar proses perencanaan pembangunan dapat segera terlaksana.
2. Perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk sarana yang belum tersedia. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang belum ada di Kelurahan Tamangapa dapat menambah tingkat perekonomian masyarakat Kelurahan Tamangapa.
3. Peninjauan dan evaluasi dari pihak terkait dalam pengelolaan TPA Antang, terlebih lokasi TPA merupakan lokasi rawan bencana banjir.
4. Pemukiman kumuh sekitaran TPA sebaiknya di tata kembali dengan menyediakan pemukiman yang layak huni. Agar masyarakat juga tidak terjangkit oenyakit dampak dari ekosistem lingkungan yang buruk di sekitar TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Makassar. (2021). *Kecamatan Manggala Dalam Angka 2021*. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Makassar. (2020). *Makassar Dalam Angka 2021*. Makassar: Badan Pusat Statistik
- Badan Standarisasi Nasional. (2004). *Standar Nasional Indonesia Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. Jakarta: BSN.
- Peemerintah Kota Makassar. (2005). *Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahunan 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015 - 2034*.
- Potoh, Nia K. (2014). *Studio Proses Perencanaan*. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.